



**Inklusi Keuangan
dalam**

Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Adhitya Wardhono ▲
Yulia Indrawati ▲
Ciplis Gema Qori'ah ▲

**Inklusi Keuangan
dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Adhitya Wardhono . Yulia Indrawati . Ciplis Gema Qori'ah



**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan;
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Adhitya Wardhono
Yulia Indrawati
Ciplis Gema Qori'ah

Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Copyright © Agustus 2018

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis:

Adhitya Wardhono

Yulia Indrawati

Ciplis Gema Qori'ah

Desain Cover: Hermawan Septian

Layout: Triana Novitasari

Diterbitkan Oleh:



Penerbit

PustakaAbadi

Bersama Membangun Generasi Literat

Anggota IKAPI No. 185/JTI/2017

Perum Istana Tegal Besar Cluster Majapahit Blok P No.2

Jember, Jawa Timur, 68132

Email: redaksi@pustakaabadi.co.id

Website: www.pustakaabadi.co.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

14,5 x 21 cm ; xvi, 224 hlm;

ISBN 978-602-5570-21-6

PENGANTAR PENULIS

Buku dengan judul “Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” merupakan lanjutan dari buku edisi pertama yang telah terbit dengan judul “Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model”. Sub pokok bahasan pada buku kedua ini lebih menekankan pada urgensi inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dengan beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin tiada batas baik dalam dimensi ruang dan waktu.

Tematik inklusi keuangan telah menjadi bahasan menarik dan telah menjadi bagian dari program utama pembangunan di hampir seluruh negara di dunia dalam upaya pendalaman sistem keuangan secara merata pada seluruh strata masyarakat. Begitu halnya di Indonesia, tantangan terbesar implementasi inklusi keuangan yang memiliki karakteristik dan kohesi sosial berbeda baik secara geografi, demografi sosiologi dan budaya.

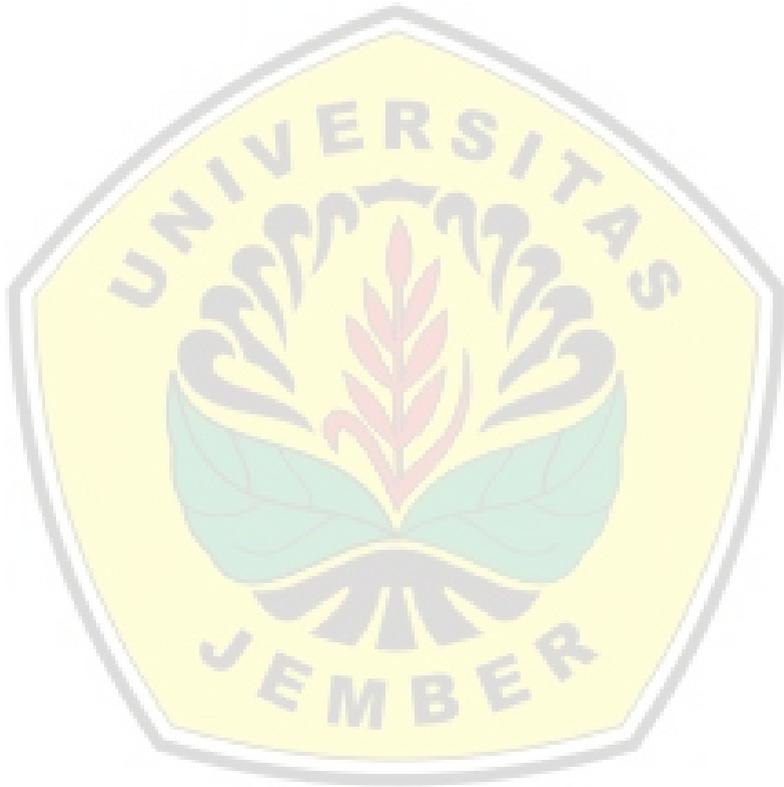
Secara khusus buku ini juga memberikan diskripsi inklusi dan literasi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan

Digital Repository Universitas Jember

memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan penguatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di Indonesia.

Jember, Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis | v

Daftar Isi | vii

Daftar Gambar | x

Daftar Tabel | xiii

Bab 1 KONSTELASI INKLUSI KEUANGAN GLOBAL | 1

1.1 Pendahuluan | 1

1.2 Definisi Inklusi Keuangan | 5

1.3 Beberapa Studi Empiris Inklusi Keuangan | 9

1.4 Perkembangan Inklusi Keuangan Global | 12

1.5 Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia | 17

**Bab 2 INKLUSI KEUANGAN DAN KOHESI SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN | 28**

Bab 3 DINAMIKA SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA | 34

3.1 Sistem Keuangan di Indonesia | 34

3.2 Interaksi Sistem Keuangan dan Pembangunan Ekonomi | 42

3.3 Karakteristik Lembaga Keuangan di Indonesia | 45

3.4 Kedalaman Sistem Keuangan (*financial deepening*) | 48

3.5 Bank sebagai Financial Intermediaries | 52

3.6 Inklusi Keuangan Nasional | 59

Bab 4 MODEL INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA | 67

4.1 Branchless Banking | 68

4.2 Digitalisasi Keuangan (*Financial Technology*) | 74

Bab 5 STUDI INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH | 78

5.1 Sosial Demografis Responden | 79

5.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember | 79

5.1.2 Sosial Demografis Responden Kabupaten Bondowoso | 86

5.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat | 90

5.2.1 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Jember | 91

5.2.2 Deskripsi Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Bondowoso | 102

5.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat | 114

5.3.1 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember | 114

5.3.2 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso | 118

5.3.3 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso | 122

Appendix | 127

Bab 6 STUDI LITERASI KEUANGAN DI DAERAH | 130

6.1 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Jember | 132

6.1.1 *Basic Financial Literacy* Kabupaten Jember | 140

6.1.2 *Advanced Financial Literacy* di Kabupaten Jember | 144

6.1.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember | 147

6.2 Studi Literasi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 159

6.2.1 *Basic Financial Literacy* di Kabupaten Bondowoso | 165

6.2.2 *Advanced Financial Literacy* di Kabupaten

Digital Repository Universitas Jember

Bondowoso | 169

6.2.3 Pola Pengelolaan Keuangan Masyarakat di
Kabupaten Bondowoso | 172

Bab 7 POSISI STRATEGIS INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH | 185

7.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan
Bondowoso | 185

7.1.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 190

7.1.2 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 194

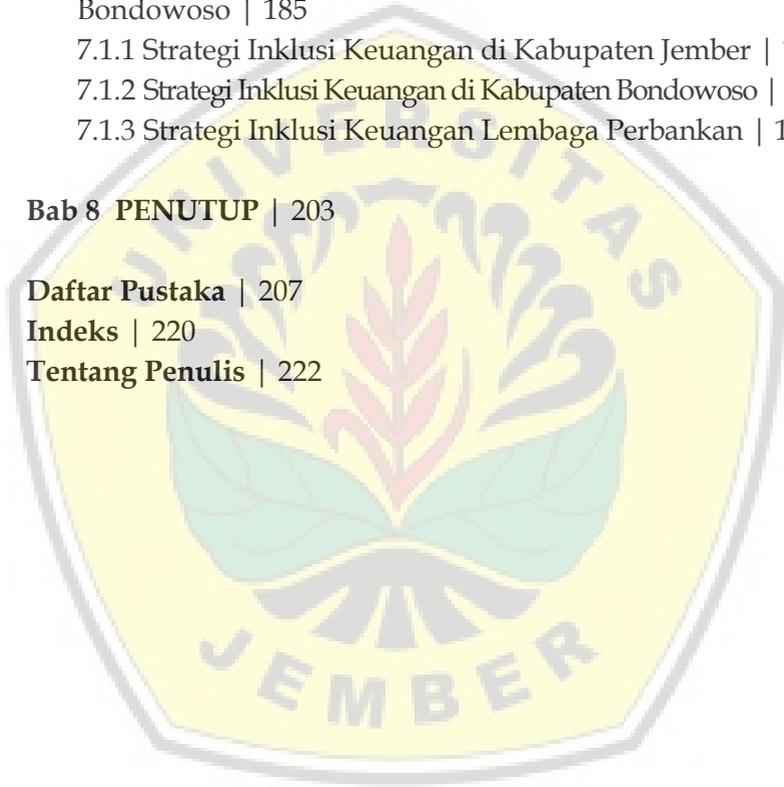
7.1.3 Strategi Inklusi Keuangan Lembaga Perbankan | 198

Bab 8 PENUTUP | 203

Daftar Pustaka | 207

Indeks | 220

Tentang Penulis | 222



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Persentase kepemilikan rekening penduduk dewasa tahun 2017 | 13
- Gambar 1.2** Jumlah penduduk dewasa yang belum memiliki rekening tahun 2017 | 13
- Gambar 1.3** Persentase penetrasi layanan keuangan global | 14
- Gambar 1.4** Persentase penetrasi pembayaran digital | 15
- Gambar 1.5** Penetrasi layanan keuangan global berdasarkan gender | 16
- Gambar 1.6** Keterkaitan keuangan inklusif dan makroprudensial | 23
- Gambar 3.1** Perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi 2004-2013 di Indonesia (%) | 43
- Gambar 3.2** Komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia | 46
- Gambar 3.3** Perkembangan jumlah bank umum di Indonesia | 47
- Gambar 3.4** Transmisi dana dalam sistem keuangan | 56
- Gambar 3.5** Karakteristik Sistem Keuangan Indonesia 2012 di Institusi Keuangan | 65
- Gambar 3.6** Karakteristik sistem keuangan Indonesia 2012 di pasar keuangan | 65
- Gambar 4.1** *Bank Led Model* | 70
- Gambar 4.2** *Telco Led Model* | 72
- Gambar 4.3** Layanan keuangan digital | 73
- Gambar 5.1** Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Jember | 79

- Gambar 5.2** Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Jember | 81
- Gambar 5.3** Jumlah tanggungan keluarga responden di Kabupaten Jember | 82
- Gambar 5.4** Komponen pengeluaran responden di Kabupaten Jember | 83
- Gambar 5.5** Komposisi tingkat pendidikan responden di Kabupaten Jember | 84
- Gambar 5.6** Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Bondowoso | 85
- Gambar 5.7** Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Bondowoso | 86
- Gambar 5.8** Jumlah tanggungan keluarga responden di Kabupaten Bondowoso | 87
- Gambar 5.9** Komponen pengeluaran responden di Kabupaten Bondowoso | 88
- Gambar 5.10** Komposisi tingkat pendidikan responden di Kabupaten Bondowoso | 89
- Gambar 5.11** Keengganan masyarakat mengakses perbankan di Kabupaten Jember | 92
- Gambar 5.12** Persepsi terhadap tingkat pelayanan bank di Kabupaten Jember | 93
- Gambar 5.13** Intensitas menabung masyarakat di Kabupaten Jember | 94
- Gambar 5.14** Intensitas checking rekening di Kabupaten Jember | 95
- Gambar 5.15** Intensitas Penarikan Tunai | 96
- Gambar 5.16** Intensitas Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 97
- Gambar 5.17** Tujuan Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 98
- Gambar 5.18** Masalah Penggunaan ATM | 99
- Gambar 5.19** Jenis Pengajuan Kredit Perbankan | 101

Digital Repository Universitas Jember

- Gambar 5.20** Keengganan Masyarakat Mengakses Perbankan di Kabupaten Bondowoso | 103
- Gambar 5.21** Persepsi terhadap Tingkat Pelayanan Bank | 104
- Gambar 5.22** Intensitas Menabung Masyarakat | 106
- Gambar 5.23** Intensitas Checking Rekening | 107
- Gambar 5.24** Intensitas Penarikan Tunai | 108
- Gambar 5.25** Intensitas Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 109
- Gambar 5.26** Tujuan Penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM) | 110
- Gambar 5.27** Masalah Penggunaan ATM | 111
- Gambar 5.28** Jenis Pengajuan Kredit Perbankan | 112
- Gambar 6.1** Komposisi Pekerjaan Responden | 134
- Gambar 6.2** Distribusi Pendapatan Responden | 135
- Gambar 6.3** Komposisi Tingkat Pendidikan Responden | 136
- Gambar 6.4** Komposisi Alasan Kepemilikan Produk Dana Pensiun | 156
- Gambar 6.5** Determinan Pemilihan Produk Keuangan | 157
- Gambar 6.6** Komposisi Pekerjaan Responden | 161
- Gambar 6.7** Distribusi Pendapatan Responden | 162
- Gambar 6.8** Komposisi Tingkat Pendidikan Responden | 163
- Gambar 6.9** Determinan Pemilihan Produk Keuangan | 181
- Gambar 7.1** Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 194
- Gambar 7.2** Posisi Strategis Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 198
- Gambar 7.3** Posisi Strategis Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 202

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Komparasi kepemilikan dan akses layanan keuangan Indonesia dan negara-negara Asia dan Pasifik tahun 2014 East Asia | 19
- Tabel 3.1** Perkembangan jumlah bank pada industri perbankan nasional tahun 2003-2011 | 38
- Tabel 3.2** Dinamika kinerja perbankan di Indonesia (%) | 39
- Tabel 3.3** Pangsa kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) pulau di Indonesia 2011-2013 (%) | 44
- Tabel 5.1** Hasil Estimasi Determinan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 115
- Tabel 5.2** Hasil estimasi determinan inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso | 118
- Tabel 5.3** Hasil estimasi model logit determinasi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 122
- Tabel 5.4** Hasil estimasi model probit determinasi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 125
- Tabel 6.1** Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat | 139
- Tabel 6.2** *Basic Financial Literacy* Berdasar Tingkat Pendapatan | 141
- Tabel 6.3** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 142
- Tabel 6.4** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin | 143
- Tabel 6.5** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan | 144
- Tabel 6.6** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendapatan | 144

Digital Repository Universitas Jember

- Tabel 6.7** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 145
- Tabel 6.8** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin | 146
- Tabel 6.9** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan | 146
- Tabel 6.10** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Frekuensi *Checking Saldo* Sebelum Penarikan | 147
- Tabel 6.11** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Frekuensi *Checking Saldo* Sebelum Penarikan | 148
- Tabel 6.12** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | 149
- Tabel 6.13** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | 149
- Tabel 6.14** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis | 150
- Tabel 6.15** *Advanced Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Bisnis | 151
- Tabel 6.16** *Advanced Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Bisnis | 152
- Tabel 6.17** *Advanced Financial Literacy* Penyelesaian Keuangan Harian | 153
- Tabel 6.18** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang | 153
- Tabel 6.19** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang | 154
- Tabel 6.20** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun | 155
- Tabel 6.21** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun | 156
- Tabel 6.22** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi | 158
- Tabel 6.23** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi | 158

- Tabel 6.24** Tipe Informasi yang diikuti Responden | 159
- Tabel 6.25** Indikator Penilaian Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat | 164
- Tabel 6.26** *Basic Financial Literacy* Berdasar Tingkat Pendapatan | 165
- Tabel 6.27** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Tingkat Pendidikan | 166
- Tabel 6.28** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin | 167
- Tabel 6.29** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan | 168
- Tabel 6.30** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendapatan | 170
- Tabel 6.31** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 170
- Tabel 6.32** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin | 171
- Tabel 6.33** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Keuangan | 171
- Tabel 6.34** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Frekuensi *Checking* Saldo Sebelum Penarikan | 172
- Tabel 6.35** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Frekuensi *Checking* Saldo Sebelum Penarikan | 173
- Tabel 6.36** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | 174
- Tabel 6.37** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | 174
- Tabel 6.38** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis | 175
- Tabel 6.39** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Bisnis | 176
- Tabel 6.40** *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian | 177
- Tabel 6.41** *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan

Digital Repository Universitas Jember

Penyelesaian Kesulitan Keuangan Harian | 177

Tabel 6.42 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang | 178

Tabel 6.43 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Alokasi Uang | 179

Tabel 6.44 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun | 180

Tabel 6.45 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Dana Pensiun | 180

Tabel 6.46 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi | 181

Tabel 6.47 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Kepemilikan Produk Asuransi | 182

Tabel 6.48 *Basic Financial Literacy* Berdasarkan Tipe Informasi yang diikuti Responden | 183

Tabel 6.49 *Advanced Financial Literacy* Berdasarkan Tipe Informasi yang diikuti Responden | 183

Tabel 7.1 Diagram SWOT Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 188

Tabel 7.2 Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 191

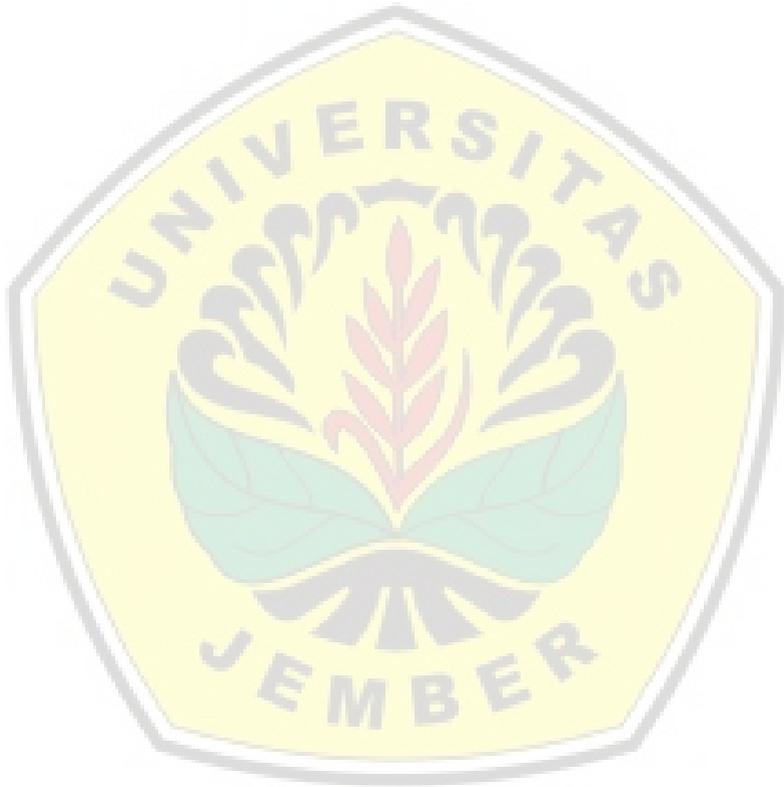
Tabel 7.3 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember | 192

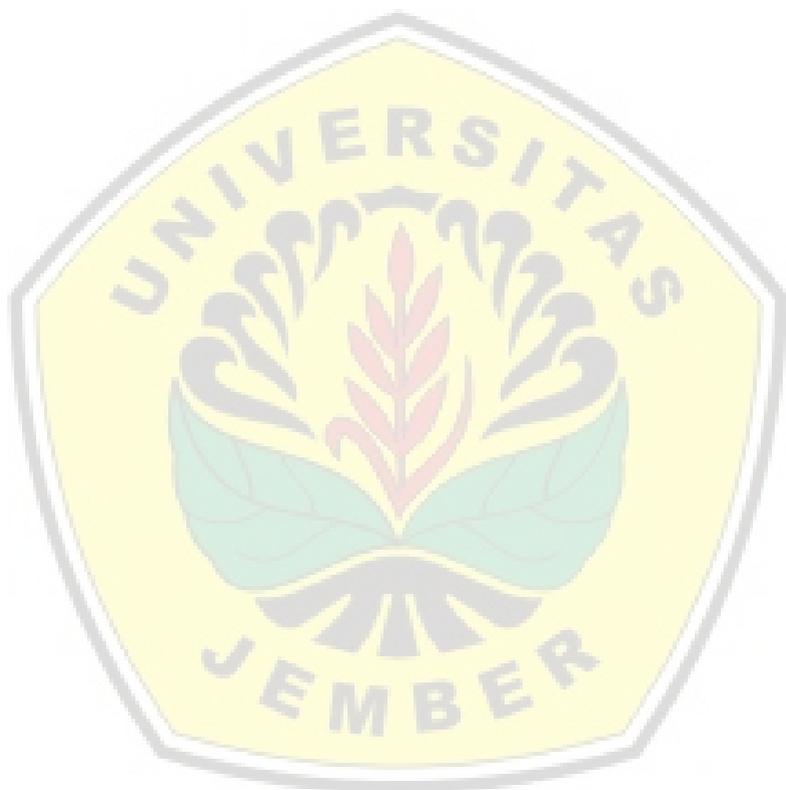
Tabel 7.4 Hasil Pemetaan Faktor Internal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 195

Tabel 7.5 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Inklusi Keuangan di Kabupaten Bondowoso | 197

Tabel 7.6 Hasil Pemetaan Faktor Internal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 199

Tabel 7.7 Hasil Pemetaan Faktor Eksternal Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso | 201





BAB I

KONSTELASI INKLUSI KEUANGAN GLOBAL

1.1 Pendahuluan

Pasca fenomena krisis keuangan global tahun 2008 yang dialami sebagian negara-negara di dunia, isu mengenai inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi diskusi menarik dalam banyak forum internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Alliance for Financial Inclusion* (AFI). Hal ini mengingatkan fenomena krisis keuangan global memberikan pelajaran berharga bagi banyak negara dalam menjaga pentingnya stabilitas sistem keuangan untuk mencapai stabilitas makroekonomi.

Pada forum G20 yang diadakan pada tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, terminologi inklusi keuangan menjadi salah satu topik kajian menarik kedepan. Topik tersebut diangkat didasarkan pada dampak krisis 2008 yang dialami oleh beberapa negara yang termasuk pada negara dengan kondisi pendapatan perkapita rendah, tinggal di

daerah terpencil, dan banyaknya masyarakat pinggiran (Park & Mercado, 2015; Bank Indonesia, 2015). Forum G20 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai upaya-upaya dalam menghadapi kondisi inklusi keuangan dengan menyusun pedoman pengembangan keuangan inklusif yaitu *"The 9 Principles for Innovative Financial Inclusion"* yang di dalamnya memuat beberapa prinsip yang meliputi *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework* (Alliance for Financial Inclusion, 2011). Hasil kesepakatan forum G20 mendorong banyak forum internasional untuk menitikberatkan pentingnya menjaga stabilitas keuangan yang terintegrasi dalam program kegiatan terkait keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk *standard body* seperti Bank for International Settlements (BIS) dan Financial Action Task Force (FATF), dan juga negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia.

Prinsip keuangan inklusif telah menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Keuangan inklusif membantu masyarakat dalam mengelola keuangan yang dimiliki dan memberikan kemudahan dalam mengakses jasa lembaga keuangan untuk memperlancar aktifitas sosial ekonomi. Tak dapat dipungkiri, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan atau *unbanked*. Terdapat berbagai motivasi yang menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked* atau tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi *supply* atau penyedia jasa, dalam kondisi ini perbankan dan baik dalam

sisi *demand* atau masyarakat itu sendiri (Bank Indonesia, 2015). Salah satu alasan utama masyarakat menjadi *unbanked* adalah terbatasnya informasi (*lack of access to information*) yang diterima oleh masyarakat terkait akses keuangan (*information barrier*) serta mahalnya administrasi untuk akses keuangan tersebut (*price barrier*) (Shankar, 2013; Rowlingson & McKay, 2014). Sehingga dari kondisi tersebut keuangan inklusif diyakini mampu memberikan jawaban atas kondisi *unbanked* dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati baik oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yaitu antara lain sebagai berikut (Bank Indonesia, 2015): (a) meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan; (b) mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*; (c) mendukung pendalaman pasar keuangan; (d) memberikan potensi pasar baru bagi perbankan; (e) mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI); (f) berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan; dan mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*.

Pada aras kebijakan, implementasi keuangan inklusif antara negara satu dengan negara lainnya memiliki variasi, pola dan inovasi yang berbeda-beda, namun secara umum dimaksudkan untuk menurunkan eksklusi keuangan yang dapat dilakukan paling tidak melalui dua pendekatan strategis, baik pendekatan secara komprehensif maupun pendekatan secara umum (Shankar, 2013; Munyanyi, 2014; Cull *et al.*, 2014). Pendekatan secara komprehensif dilakukan dengan menyusun suatu strategi nasional melalui program terpisah, salah satunya contohnya yakni memberikan edukasi

BAB 2

INKLUSI KEUANGAN DAN KOHESI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Inklusi keuangan berkembang sebagai kritik terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif. Jasa keuangan dapat mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi investasi kesehatan, pendidikan, usaha, dan pengelolaan keuangan. World Bank melalui *The Commission on Growth and Development* (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses asset perekonomian dan pasar yang pada akhirnya menciptakan pemerataan peluang bagi generasi selanjutnya. Pertumbuhan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan (miskin) dapat terlibat dalam proses pembangunan (Samans *et al.*, 2015). Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/kaum yang termarginalkan di dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan dianggap sebagai pertumbuhan yang pro-kemiskinan apabila masyarakat miskin diuntungkan yang tercermin dari beberapa ukuran kemiskinan yang disepakati secara luas (Ravallion & Chen, 2002). Terkait dengan realitas empiris ini mendapat rujukan berarti dari Kraay (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dikatakan pro-kemiskinan jika pendapatan dari masyarakat miskin tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Pencapaian pertumbuhan inklusif melalui pendalaman keuangan atau inklusi keuangan ditentukan oleh peran lembaga keuangan. Pasar dan institusi keuangan memiliki fungsi untuk mengurangi efek informasi asimetris dan biaya transaksi. Lembaga keuangan melalui perannya dapat membantu memobilisasi dana dan tabungan serta menyediakan layanan pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa (Wang'oo, 2008). Selain itu, lembaga keuangan juga memproduksi dan memproses informasi tentang investor dan proyek investasi sehingga memungkinkan alokasi dana yang lebih efisien. Minimnya lembaga keuangan dan pasar yang efisien serta maju menyebabkan pendapatan dan standar hidup masyarakat mengarah pada pembangunan ekonomi yang rendah. Lembaga dan pasar keuangan yang bekerja dengan baik akan memberikan kesempatan bagi semua pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi terbaik dengan mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Wang'oo, 2008).

Di negara berkembang sebagian besar masyarakat masih tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Hal ini diistilahkan *unbanked* yang mengacu pada artian masyarakat yang tidak menggunakan layanan keuangan formal seperti perbankan. Sekitar 50 persen masyarakat di dunia tidak memiliki akses terhadap perbankan (Aguerra, 2015). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa layanan jasa keuangan belum mampu seluruh lapisan masyarakat. Terdapat kesenjangan yang ekstrim dalam akses dan penggunaan layanan keuangan formal di dalam dan di luar negeri. Peningkatan akses layanan keuangan juga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, mengurangi kerentanan terhadap guncangan (*shock*) dan meningkatkan investasi sebagai modal masyarakat. Dengan rendahnya sistem keuangan inklusif, individu dan perusahaan perlu bergantung pada sumber daya mereka sendiri yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka dan mengejar peluang pertumbuhan yang menjanjikan.

Dalam mencapai tujuan stabilitas keuangan, bank berfokus pada penguatan sektor keuangan, peningkatan regulasi dan menciptakan kesadaran publik melalui literasi keuangan dan pendidikan sebagai bagian dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas keuangan dan membantu mendorong pertumbuhan serta mengurangi ketidakesetaraan (*inequality*) (Adnan, 2011; Julie, 2013; Nancy, 2016). Inklusi keuangan mengindikasikan tingginya akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh individu atau perusahaan dengan biaya yang terjangkau (Tarkesh, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, keuangan yang inklusif memiliki peran penting

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Alam dan Sami, 2017; Raman, 2012; Okoye *et al.*, 2017). Hal ini memungkinkan untuk mengurangi kesenjangan antar populasi masyarakat miskin dan kaya dalam memanfaatkan layanan keuangan.

Financial inclusion merupakan antitesis dari eksklusi keuangan (Levshon dan Thrift, 1995., Adewale, 2014). Eksklusi keuangan menggambarkan bahwa masyarakat miskin tidak dapat mengakses fungsi dari sektor keuangan untuk mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan akan merugikan masyarakat karena akses keuangan yang susah dijangkau oleh lapisan masyarakat, jaminan yang ditetapkan perbankan, riwayat kredit dan juga jaringan. Oleh karena itu, kebijakan sektor keuangan harus menghilangkan hambatan tersebut agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Menurut Demirgüç-Kunt *et al.* (2008) dan juga Chandran dan Manju, (2010) untuk menghilangkan hambatan sektor keuangan dilakukan melalui penghapusan hambatan harga maupun *non* harga karena tanpa menghilangkan *financial barriers* masyarakat miskin secara terus-menerus akan tetap miskin. Inklusi keuangan merupakan sebuah konsep baru yang mana dapat membantu pembangunan yang berkelanjutan suatu negara serta pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, layanan keuangan yang tersedia bagi masyarakat yang belum terjangkau dengan bantuan lembaga keuangan (Paramasivan dan Ganeshkumar, 2013; Aguera, 2015). Inklusi Keuangan yang baik memiliki ciri terjangkau oleh konsumen, berkelanjutan atau menguntungkan bagi penyedia dan aman (tidak mengancam perlindungan konsumen atau stabilitas) (Aguera, 2015).

BAB 3

DINAMIKA SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

3.1 Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan inovasi teknologi (Levine, 1998).

Sistem keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari penabung (*lender/savers*) kepada peminjam (*borrower/spender*) untuk membiayai kegiatan yang produktif. Dana dapat berpindah dari penabung (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) dalam 3 (tiga) cara, yaitu Pembiayaan Langsung (*Direct Finance*), Pembiayaan Semi Langsung (*Semi Direct*

Finance), dan Pembiayaan Tidak Langsung (*Indirect Finance*).

Berikut ini akan dijelaskan masing masing cara tersebut.

- 1) Pembiayaan Langsung adalah pemberian kredit/ pembiayaan langsung dilakukan oleh pemilik dana (unit surplus) ke peminjam (unit defisit) tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan, sehingga ada penyerahan bukti hutang, seperti obligasi, saham atau promes kepada unit surplus. Bukti hutang atau surat berharga ini merupakan sekuritas primer.
- 2) Pembiayaan Semi Langsung merupakan proses pemindahan dana yang dipinjamkan dari unit surplus ke unit defisit menggunakan perantara perorangan atau institusi. Pembiayaan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui bank investasi (*investment bank*) atau broker/*dealer*. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa bank investasi dan bank tersebut berfungsi sebagai *underwriting* surat berharga, maka transaksi ini dikenal sebagai pasar perdana (*primary market*). Pasar perdana merupakan pasar keuangan dimana surat berharga pertama kali dikeluarkan dan dijual kepada pembeli awal yang disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*). *Underwriting* surat berharga merupakan institusi yang menjamin suatu harga dari surat berharga tertentu dan kemudian menjualnya kepada masyarakat. Jika dilakukan dengan menggunakan jasa broker/*dealer* maka transaksi ini dikenal dengan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder merupakan pasar keuangan dimana surat berharga diperdagangkan setelah dikeluarkan oleh bursa. Broker merupakan agen dari investor yang mempertemukan pembeli dan penjual surat berharga;

sedangkan *dealer* merupakan penghubung pembeli dan penjual surat berharga dengan cara membeli dan menjual pada saat transaksi.

- 3) Pembiayaan Tidak Langsung merupakan proses pemindahan dana pinjaman dari unit surplus ke unit defisit melalui lembaga intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan sekuritas dan reksadana. Penggunaan lembaga intermediasi penting dalam perekonomian karena dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam pembiayaan langsung.

Fungsi intermediasi memungkinkan lembaga keuangan menggalang dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana khususnya sektor riil. Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak lepas dari perkembangan sistem keuangan. Secara konsepsional, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian didorong oleh empat hal, antara lain pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor riil, integrasi sistem keuangan global dan regional, kompleksitas sistem keuangan dan perubahan komposisi dalam proses sistem keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana komposisi aset non moneter menjadi lebih penting (Houben, 2004).

Fungsi pokok lain dalam suatu sistem keuangan yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko dan fungsi kebijakan. Dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan

BAB 4

MODEL INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Perkembangan inklusi keuangan global yang sangat cepat didorong oleh perubahan percepatan dan inovasi teknologi khususnya media *mobil phone* sehingga menjadi lebih mudah terakses dan inklusif. Media komunikasi melalui *mobil phone* menjadi pilihan dalam menawarkan akses jasa keuangan pada masyarakat pada berbagai wilayah. Penetrasi *mobile phone* di dunia mencapai kurang lebih satu miliar orang namun di sisi lain sekitar 1,7 miliar pada tahun 2012 belum memanfaatkan lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan salah satu kendala dalam pengembangan inklusi keuangan adalah wilayah geografis tiap daerah yang berbeda-beda yang masih sulit terakses oleh layanan jasa keuangan.

Implementasi *financial inclusion* khususnya lembaga keuangan perbankan masih menghadapi beberapa kendala baik yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga keuangan perbankan. Bagi masyarakat, kendala yang dihadapi seperti tidak adanya bank di sekitar tempat tinggalnya atau

memakan waktu yang cukup lama untuk menuju kantor cabang terdekat, selain itu juga tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang. Adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan antara lain adalah keterbatasan cakupan wilayah dalam memperluas jaringan kantor. Di sisi lain, untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil perbankan dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal.

4.1 Branchless Banking

Branchless Banking merupakan salah satu bagian dari program *financial inclusion* untuk memberikan jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terbatas melalui unit khusus pelayanan keuangan atau agen tanpa harus melalui pendirian kantor fisik bank. Dalam *Preliminary Study Bank Indonesia* (2011) disebutkan bahwa *Branchless Banking* secara umum merupakan strategi melayani masyarakat akan jasa keuangan tanpa ketergantungan pada kantor cabang bank secara fisik atau melakukan *outsourcing* proses transaksi layanan jasa perbankan kepada pihak ketiga. Strategi tersebut merupakan pelengkap dari jaringan kantor yang telah ada untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien. Menurut CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*) definisi *Branchless Banking* sebagai pemberian jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang bank dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel bukan bank (Lyman *et al.*, 2006). Keberadaan *Branchless Banking* diyakini berpotensi untuk mengurangi biaya dan sebaliknya justru meningkatkan pelayanan perbankan tanpa cabang dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen

masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh bank. *Branchless Banking* memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan akses keuangan melalui kerjasama dengan agen ritel, lembaga keuangan mikro, operator telepon seluler dan perusahaan teknologi.

Menurut CGAP terdapat beberapa elemen *Branchless Banking* yaitu 1) Penggunaan teknologi, seperti kartu pembayaran atau telepon selular untuk mengidentifikasi konsumen dan mencatat transaksi secara elektronik dan dalam beberapa kasus memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi jarak jauh; 2) Penggunaan outlet pihak ketiga baik secara eksklusif maupun non eksklusif seperti kantor pos, pedagang kelontong, pom bensin, agen penjual pulsa telepon genggam, toko swalayan; 3) Menyediakan paling kurang jasa penarikan dan penyetoran disamping transaksi dan jasa keuangan lainnya; 4) Didukung oleh institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai institusi yang dapat menjalankan fungsi pengumpulan dana pihak ketiga seperti bank.

Pelayanan jasa keuangan melalui model *Branchless Banking* dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu:

1. *Bank Led Model*

Gambar 13 merupakan *Bank Led Model*, dimana dalam model ini perbankan menggunakan jasa telekomunikasi atau agen atau kedua-duanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Lyman, *et., al.* (2006), bank dapat menciptakan produk dan jasa keuangan, namun pendistribusian produk dan layanan tersebut dilakukan melalui *retail agent* yang mengelola nasabah. Bank berperan penuh mulai dari proses perizinan awal, pelaksanaan

BAB 5

STUDI INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH

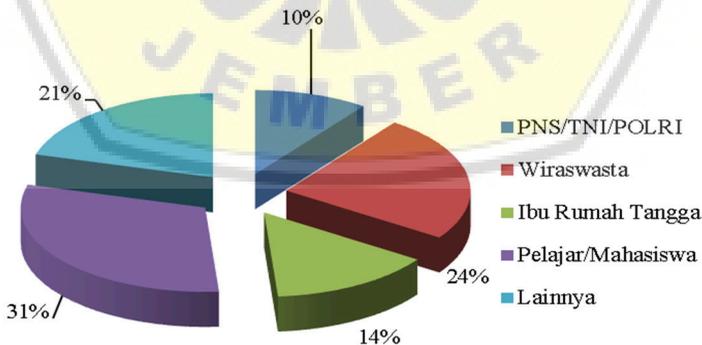
Studi inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso mencakup profil umum atau sosial demografis responden yang menjadi sampel, deskripsi tingkat inklusi keuangan dan determinan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan. Dari tiap kabupaten dipilih tiga kecamatan sebagai sampel dengan kriteria daerah maju, berkembang (moderat) dan tertinggal. Di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Summersari sebagai daerah maju, Kecamatan Wuluhan sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Kalisat sebagai daerah tertinggal. Sementara di Kabupaten Bondowoso meliputi Kota Bondowoso sebagai daerah maju, Kecamatan Sumber

Wringin sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Tenggarang sebagai daerah tertinggal. Jumlah responden untuk tiap kecamatan adalah 60 orang sehingga total responden sebanyak 180 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta dan pelajar atau mahasiswa untuk tiap Kabupaten. Total responden untuk dua kabupaten adalah 360 orang.

5.1 Sosial Demografis Responden

5.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember

Responden dalam survei berjumlah 180 responden terdiri dari 58 orang laki-laki dan 122 orang perempuan. Pada umumnya responden telah menikah yaitu 62,1 persen dan 37,9 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 63,3 persen, antara 36 hingga 60 adalah 36,1 persen dan diatas 60 tahun adalah 0,6 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 14,4 persen ibu rumah tangga, 10 persen PNS/TNI/POLRI, 24,4 persen wiraswasta dan 30,6 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber: Data Primer (diolah), 2015

Gambar 5.1 Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Jember

sebanyak 7 orang yang diikuti jumlah keluarga sebanyak 6 orang. Kondisi tersebut terjadi karena responden memiliki tanggungan dari keluarga besar yang terdiri dari Suami, Istri, Anak, Orang Tua/Mertua, dan keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah.

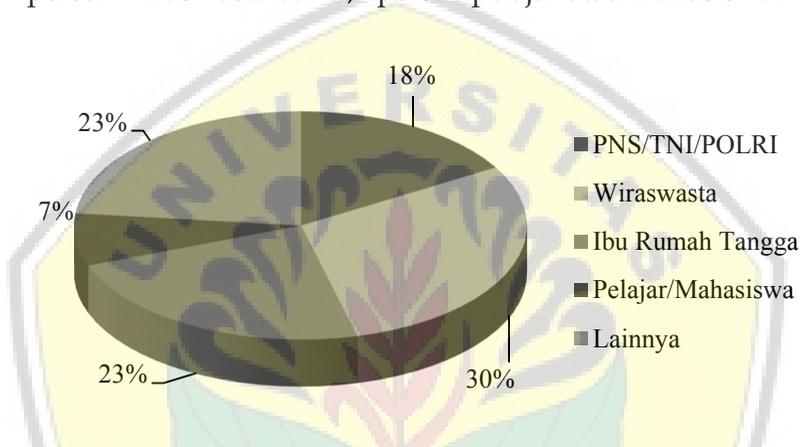


Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Gambar 5.2 Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Jember

Jamaknya tanggungan yang dibebankan pada responden juga mengakibatkan variasi komponen pengeluaran yang harus menjadi kegiatan bulanan, mingguan atau bahkan harian. Pendapatan responden umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer yang mana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tendensi kedua dan ketiga, komponen pengeluaran yang selalu dianggarkan dalam pengeluarannya adalah komunikasi dan biaya kewajiban. Seiring berkembangnya jaman yang memaksa masyarakat untuk lebih cerdas dalam berkomunikasi kini, hampir seluruh

persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Gambar 5.6 Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Bondowoso

Paparan kondisi budaya di atas mempengaruhi masih rendahnya tingkat pendapatan responden. Rata-rata pendapatan responden hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan primer. Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden rata-rata berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 25,6 persen responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- diikuti sebanyak 46,2 persen responden

BAB 6

STUDI LITERASI KEUANGAN DI DAERAH

Dalam beberapa dekade terakhir, selain inklusi keuangan, literasi keuangan juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, industri perbankan, konsumen dan organisasi lainnya. Bahkan pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meresmikan peluncuran cetak biru literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi sangat penting terutama bagi rumah tangga dalam mengelola keuangan yang akan digunakan untuk kebutuhan penting yang akan datang seperti pendidikan, kesehatan, investasi dan sebagainya. Hal ini mengingat pengelolaan keuangan yang

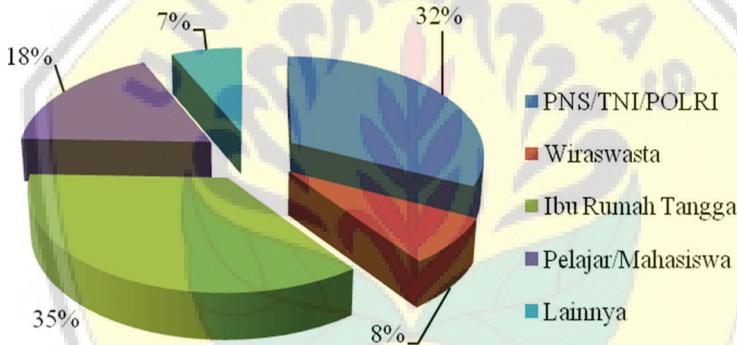
tidak tepat dapat menyebabkan kerentanan rumah tangga terhadap potensi terjadinya krisis keuangan.

Secara definitif, literasi keuangan memiliki beragam definisi yang berbeda-beda. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengelola secara efektif keuangan dalam mencapai keuangan yang baik (*American Institute of Certified Public Accountants*, 2013). Garman and Forgue (2000) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan terhadap realitas dan referensi dalam mengelola keuangan dengan sukses. Sementara menurut Kim (2001) bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dasar seseorang untuk dapat bertahan dalam kehidupan modern dengan semakin kompleksnya prinsip dalam pengeluaran, tabungan dan investasi.

Huston (2010) mengidentifikasi empat kategori definisi literasi keuangan dan pengetahuan yaitu keuangan dasar individu, pinjaman, tabungan atau investasi dan proteksi. Bahwa literasi keuangan secara konseptual memiliki dua dimensi yaitu memahami pengetahuan keuangan yang dimiliki secara teori dan menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki secara aplikasi. Oleh karena itu literasi keuangan seharusnya didefinisikan sebagai mengukur seberapa baik seseorang dapat memahami dan menggunakan keuangan berdasarkan informasi yang dimiliki.

Lusardi dan Mitchell (2006) menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan dipengaruhi oleh usia untuk kasus di Amerika Serikat begitu halnya studi Cole *et al.*, (2008) bahwa usia menjadi faktor yang signifikan terhadap literasi keuangan di India dan Indonesia. Faktor lainnya adalah *gender* sebagaimana studi Mandell (2008), Cole *et al.*, (2008),

Responden dalam survey berjumlah 180 responden terdiri dari 81 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Pada umumnya responden telah menikah yaitu 80 persen dan 20 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa.



Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Gambar 6.1 Komposisi Pekerjaan Responden

Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden rata-rata berada berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden adalah ibu rumah tangga dan pelajar atau mahasiswa yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 19 responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- diikuti sebanyak 15 responden dengan kisaran pendapatan antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan 12 orang berada pada kisaran Rp. 4.000.000,- hingga Rp.

BAB 7

POSISI STRATEGIS INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH

7.1 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse, 2006). Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan pembelian lebih baik (Mishkin, 2008). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bergantung terhadap situasi ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global turut pula menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Sehingga penguatan sistem keuangan diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Ketahanan keuangan

menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

Inklusi keuangan telah menjadi diskusi menarik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah rekening tabungan di dunia lebih besar dari jumlah penduduk dunia namun separuh dari masyarakat dewasa masih belum memiliki tabungan atau *unbanked*. Dalam tataran makro, perkembangan keuangan adalah mengukur kedalaman jasa keuangan seperti proporsi jumlah kredit sektor swasta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Oleh karena itu inklusi keuangan terkait langsung dengan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Inklusi keuangan juga memiliki peran penting terhadap pembangunan kualitas manusia. Sementara pada tataran mikro, adalah membantu masyarakat terhadap jasa keuangan dapat memitigasi resiko pada saat terjadi kejutan perekonomian. Adanya kejutan dapat menjadi *catastrophic*. Jasa keuangan membantu masyarakat dalam menabung dan mendapatkan keuntungan bunga sehingga menjadi modal produktif dan nantinya memberikan implikasi bagi stabilitas keuangan secara keseluruhan (Beck, *et. al.*, 2006).

Dalam hal untuk meningkatkan strategi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso, identifikasi terhadap potensi dan masalah menjadi sangat penting dalam memetakan strategi inklusi keuangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunity* dan *Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang

(*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threatness*) (Rangkuti, 2000).

Pemetaan potensi atau posisi strategis inklusi keuangan mencakup 23 faktor yang terdiri dari 13 faktor internal dan 8 faktor eksternal. Faktor kekuatan internal mencakup banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat, banyaknya masyarakat yang memiliki alat komunikasi, besarnya minat masyarakat dalam menabung, besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit, potensi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, ketertarikan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta berkembangnya UMKM. Sementara kelemahan internal antara lain adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal, masih tingginya minat masyarakat terhadap jasa keuangan non formal, tingginya kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran kredit dari perbankan, masih tingginya penawaran pinjaman dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi namun dengan prosedur mudah, masih adanya pandangan atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap lembaga keuangan, serta masih rendahnya sosialisasi produk jasa keuangan secara persuasif.

Faktor eksternal peluang mencakup perkembangan jumlah penduduk, dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan global, perkembangan teknologi informasi di masyarakat, peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, dan dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan. Sedangkan kendala eksternal adalah meningkatnya jumlah lembaga keuangan

BAB 8

PENUTUP

Pemahaman atas kerangka kerja inklusi keuangan dari tataran konseptual hingga mencermati impiantasi di lapangan menjadi tidak saja penting tetapi juga *urgent* dalam proses pembangunan keuangan masyarakat. Kenyataan terkadang memiliki banyak anomali dengan konsepsi dan kebijakan yang ada. Namun demikian evaluasi dan *monitoring* dalam rupa yang intensif dan berkelanjutan menjadi perlu mendapat penekanan. Sebagaimana paparan dalam bab-bab di atas dari ranah konseptual, rancangan kebijakan hingga analisis empiris menyadarkan perlunya secara konsisten membedah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kepentingan memahami aset keuangan yang dimilikinya hingga aku cerdas dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.

Secara agregat inklusi keuangan di daerah menunjukkan karakteristik pola inklusi yang sama dan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan ketersediaan jumlah lembaga perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan keuangannya, kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga

keuangan formal dan intensitas keterlibatan masyarakat dalam penggunaan jasa lembaga keuangan formal. Namun sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau keuangan yang disebabkan oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan pemberi jasa keuangan individu lainnya. Sementara akses masyarakat terhadap fasilitas kredit keuangan khususnya kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi potensial dalam mengembangkan sektor riil.

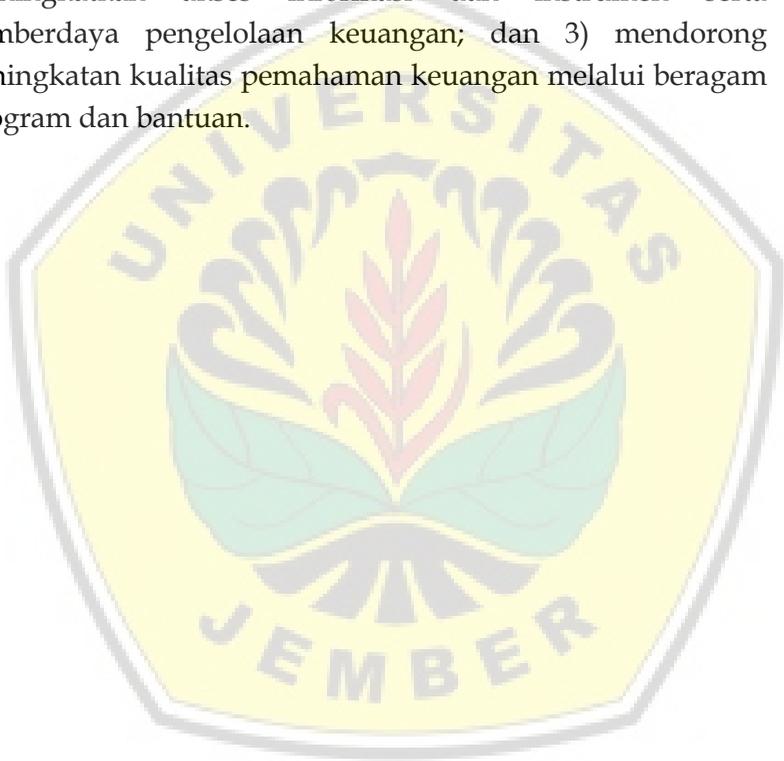
Determinan inklusi keuangan masyarakat adalah usia, tingkat pendidikan, literasi keuangan dan jarak lembaga keuangan pada keterjangkauan masyarakat. Beberapa hal menarik dari temuan penelitian bahwa peluang laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan perempuan karena dominasi perempuan dalam pengelolaan keuangan, begitu halnya dengan tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan tidak terdapat kesenjangan pendapatan yang mempengaruhi inklusi, masyarakat dengan strata pendapatan berbeda memiliki pola yang sama dalam menjangkau jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan nasional dan daerah yang berpusat pada masyarakat ini perlu memfokuskan pada kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Maka kerangka strategi inklusi keuangan terdiri dari (1) Edukasi keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. (2) Fasilitas keuangan

publik mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. (3) Pemetaan informasi keuangan. (4) Pelaksanaan program inklusi keuangan membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. (5) Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan.

Secara agregat baik pada tingkat *basic financial literacy* dan *advanced financial literacy* dipengaruhi tingkat pendapatan, pendidikan, *gender*, kepemilikan terhadap produk keuangan dan perilaku masyarakat terhadap jasa keuangan. Kepemilikan produk keuangan dana pensiun masih rendah yang disebabkan masih minimnya pengetahuan mengenai dana pensiun dan berbanding terbalik dengan kepemilikan pada produk asuransi. Pentingnya keseimbangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan yang baik. Diharapkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik pula sebagai sebuah ekosistem keuangan yang memiliki simbiosis dalam menghasilkan inovasi produk-produk keuangan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Inklusi keuangan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata terutama daerah *remote area*, dan produk jasa keuangan semakin inovatif sesuai dengan karakteristik demografi dan budaya masyarakat di tiap daerah.

Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan instrumen serta sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam program dan bantuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adasme, Osvaldo., Majnoni, Giovanni., and Uribe, Myriam. 2006. Acces and Risk: Friend or Foes? *World Bank Policy Research Working Paper* 4003.
- Adewale, A.A. 2014. Financial Exclusion and Livelihood Assets Acquisition Among Muslim Households in Ilorin, Nigeria: A Structural Invariance Analysis. *International Journal of Economics, Management and Accounting* 22. No.2. Hal. 69-94
- Adnan, N. 2011. Measurement of Financial Development: A Fresh Approach. *Qatar: 8th International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Aguera, Philippe. 2015. Financial Inclusion, Growth and Poverty Reduction. *Eccas Regional Conference*. 23 Maret 2015. World Bank
- Alam B. and Sami S. 2017. Role of banks in financial inclusion in India. *Journal*. Voume 62, Issue 2, April- June 2017, Pages 644-656, available online at <http://www.science-direct.com/science/article/pii/S0186104217300104>
- Alejandro, Carlos F. Diaz. 1985. Good-Bye Financial Repression, Hello Financial Crash. *Working Paper* 24 August.
- Alliance for Financial Inclusion. 2011. G20 Principles for Innovative Financial Inclusion. Online access on <http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20Principles%20for%20Innovative%20Financial%20Inclusion%20-%20AFI%20brochure.pdf>

- services in developing countries? *Harvard Business School Working Paper*, No. 09-117.
- Cole, Shawn, Thomas Sampson, and Bilal Zia. 2008. Money or knowledge? What drives the demand for financial services in developing countries? *Harvard Business School Working Paper*, No. 09-117
- Cull, R., Ehrbeck, T., & Hollo, N. 2014. Financial Inclusion and Development : Recent Impact Evidence. *Focus Note OCGAP*, No. 92.
- Dabla-Norris, E., Ji, Y., Townsend, R., & Unsal, F. 2015.. Identifying Constraints to Financial Inclusion and Their Impact on GDP and Inequality: A Structural Framework for Policy. *D.C. Washington: International Monetary Fund*.
- De Gregorio, J., & Guidotti, P. 1995. Financial development and economic growth. *World Development*, 23(3), 433-448.
- Definit, Seadi dan OJK. 2013. *Developing Indonesian Financial Literacy Index*. Financial Report
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., dan Honohan, P. 2008. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. *Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report*.
- Diamond, Douglas W and Rajan, Raghuram G. 2001. Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking. *Journal of Political Economy*. Vol. 109 No.2 PP 287-327.
- Diamond, Douglas W. 1984. Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *Review of Economic Studies*. LI, 393-414.
- Fritzer, Friedrich. 2004. "Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective." *Monetary Policy and The Economy 2nd Quarter*, pp. 72-87.
- Goldberg, Linda S. 2009. Micro, Macro, and Strategic Forces in Invoicing International Trade. *NBER Working Paper* 15470.

- Hung, Angela A., Andrew M.Parker and Joanne K. Yoong. 2009. Defining and Measuring Financial Literacy. *Working Paper RAND Labor and Population*. September
- Huston, Sandra. 2010. Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs* 44 (summer): 271-275
- Inderst, Roman. & Mueller, Holger M. 2008. Bank Capital Structure and Credit Decisions. *Journal of Financial Intermediation* : No. 17.
- Inklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx.
- Insukindro. 1990. Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi: Sebuah Studi Kasus Barang Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1-11.
- Jaising, Naushita. 2013. Financial Inclusion in Ghana : A Pre-Diagnostic Study. *Master Thesis IE School of International Relations*.
- Julie, O. 2013. The Relationship Between Financial Inclusion and GDP Growth. *A research project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of degree of master of business administration of the University of Nairobi*.
- Kar, M., Pentecost. E. 2000. "The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence", *Economic Research Paper*, Department of Economics, Loughborough University, No: 00/27
- Kar, M., Agir, H. and Peker, O. (2010) "Financial development and poverty reduction in Turkey", *Conference Proceedings*, pp.681-703. Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics. Turkey.
- Kashyap, Anil K and Stein, Jeremy C. What Do A Million Observations on Banks Say About The Transmission of Monetary Policy?. *NBER Working Paper*.
- Kempson E., Collard S., and Moore N. 2005. *Measuring Financial Capability : An Exploratory Study*. Financial Service Authority. Consumer Research Report. No. 37

- Inequality: case of Suriname. *Working Papers* Centrale Bank Van Suriname.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nguena, C.L., Abimbola, T.M. 2013. Financial Deepening Dynamics and Implication for Financial Policy Coordination in a Monetary Union: the case of WAEMU. *African Economic Conference*. African Development Bank.
- Nkoro, E. & Uko, A. K. 2012. Foreign Capital Flows and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Approach. *Asian Journal of Empirical Research*,2(5):149-161.
- Okoye L. U., Adetiloye K. A., Erin O., dan Modebe N. J. 2017. Financial Inclusion as a Strategy for Enhanced Economic Growth and Development. *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol. 22 No. 58
- Paramasivan, C dan Ganeshkumar, V. 2013. Overview of Financial Inclusion in India. *Journal*. Volume No. 2 (2013), ISSUE No.3 (March). ISSN (Online): 2320-0685
- Park, C. Y. & Mercado, R. V. 2015. Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia . *ADB Economics Working Paper Series*, No. 426.
- Priyarsono *et,al*. 2011. Struktur pasar persaingan perbankan Indonesia dalam periode konsolidasi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol.8.No.2
- Rajan, R.G., and L. Zingales, 1998. Financial Dependence and Growth. *American Economic Review*, Vol. 88, No. 3, pp. 559-86.
- Ravalion , M. & Chen, S. 2002. Measuring Pro-Poor Growth. *Economics Letters*, 78, PP. 93-99.
- Remund, D L. 2010. *Financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy*. *Journal of Consumer Affairs* Volume 44 Issue 2
- Rowlingson, K. & McKay, S. 2014. Financial Inclusion Annual Monitoring Report 2013. *Working Paper University of Birmingham*, pp 1 – 40.

- Shankar, S. 2013. Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers?. *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 2, Issue 1, pp. 60 -74.
- Sharma, M. 2008. Index of Financial Inclusion. *Working Paper* no. 215, ICRIER.
- Siringoringo, Renniwaty. 2012. Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2012.
- Tarkesh I. 2011, Financial Inclusion and Poverty Alleviation in India: An Empirical Analysis Using State-wise Data Takeshi Inoue. Available online at https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230304956_4
- Ummah. (2012). Analisis keterkaitan inklusi keuangan dengan pembangunan di Asia. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. 2012. A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD. *Consumer Interest Annual*. Volume 59.
- Wachira MI, Kihiu EN. (2012). Impact of financial literacy on access to financial services in Kenya. *International Journal of Business an Social Science*. Vol 3 No.19.
- Wang'oo E. W. 2008. The Relationship Between Financial Inclusion and Economic Development in Kenya. D61/71243/2008
- Wardhono, Adhitya, Ciplis Gema Qoriah, Yulia Indrawati. 2016. *The Determinants of Financial Inclusion: Evidence from Indonesian Districts*. *International Journal of economic Perspectives*: Volume 10, Issue 4, 472-483
- World Bank. 1994. *East Asia'a Trade and Investment: Regional and Global Gains from Liberalization*. United State of America: The International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank.

INDEKS

A

Alejandro, 49, 207

Alquist, 60, 208

B

Beck, Demirguc-Kunt, 4

Bikker & Wesseling, 55, 57

Bindseil dan Jabtecki, 52

Braunstein & Welch, 59

C

Campello, 58, 209

Cole *et al*, 131, 132

Cull *et al*, 3

D

Diamond, 54, 210

F

Fritzer, 60, 210

G

Gerrans & Hershey, 18

Goldberg, 57, 211

Goldsmith, 132, 212

Gregorio, 33, 49, 210, 212

H

Hart, 54, 212

Huston, 131

I

Insukindro, 54, 213

J

Jaising, 11, 213

K

Kahsyap dan Stein, 58

Kar dan Pentecost, 62

Kempson dan Whyley, 62

Khan, 23, 214

Kharchenko, 11, 132, 214

Kim, 131

King dan Levine, 65

Kishan dan Opiela, 55, 58

Kiyotaki dan Moore, 50

Kraay, 29, 214

Kularatne, 60, 216
Kusumaningtyas, 52

L

Lerman & Bell, 59
Levine, 34, 42, 50, 59, 208, 214,
216
Liu, 50, 216
Lucas, 59, 216
Lusardi dan Mitchell, 131, 132
Lynch, 50, 217

M

Mackinnon & Shaw, 50
Mc Kinnon, 65
McFarlane, 41, 60, 217
Meier dan Seers, 59
Miller, 55, 218
Mitchell, 132, 216
Mohan dan Hickey, 49
Murphy, 53

N

Nasution, 52, 219
Nguena, 41, 60, 219
Nkoro dan Uko, 60

O

Opiela, 214

P

Prasad, 24
Priyarsono et al, 37

Q

Qi, 54

R

Ravallion & Chen, 29

S

Sabirin, 51, 220
Samans *et al*, 28
Sarma, 6, 9, 67, 220
Saunders, 54, 220
Schinasi, 40, 41, 60, 212
Scholtens & Wensveen, 55
Schumpeter, 59, 214, 220
Siringoringo, 57, 221

U

Ummah, 10, 221

V

Van der Werff *et al*, 12

TENTANG PENULIS



Adhitya Wardhono, S.E, M.Si, M.Sc, Ph.D, lahir di Surakarta, Jawa tengah (1971). Beliau adalah seorang dosen dan peneliti di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember sejak tahun 1998. Menamatkan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (1994), kemudian melanjutkan studi Program Pasca Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (1998). Pada tahun 2000-2002, beliau melanjutkan studi S2 pada Fakultas Ekonomi di Philipps University Marburg, Jerman mendapat beasiswa dari Landes Regierung Hessen, Germany. Pada tahun 2003 - 2006 mendapat beasiswa dari DAAD Jerman untuk melanjutkan studi S3 di Georg-August University of Goettingen, Jerman.

Selain aktif menulis di jurnal dan media serta narasumber terkait masalah perekonomian Indonesia dan dunia, minat penelitian cenderung pada bidang Ekonomi Keuangan dan Moneter dan Ekonomi Pembangunan. Beberapa penelitian yang beliau hasilkan adalah *Penelitian Dasar Potensi Ekonomi*

Daerah Dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyuwangi (2011), Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jember (2011), Determinan Pembentukan Harga di Kabupaten Jember (2013), dan Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember Dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model (2015-2016). Selain sebagai dosen, beliau saat ini juga sebagai Koordinator Pusat Layanan Internasional, Universitas Jember, dan juga sebagai *reviewer* di beberapa jurnal nasional maupun internasional.



Ciplis Gema Qori'ah, SE, M.Sc., lahir di Banyuwangi, Jawa Timur (1977) adalah seorang dosen dan peneliti di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember sejak tahun 2008. Menyelesaikan studi S1 bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember (2000) dan menyelesaikan studi S2 bidang Ekonomi Pembangunan dan Pedesaan dari Georg-August University Goettingen, Jerman (2006). Saat ini beliau sedang menyelesaikan Studi S3 Bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada.

Bidang penelitian yang diminati adalah ekonomi moneter dan ekonomi pembangunan. Beberapa karya penelitian yang dihasilkan antara lain *Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Formasi Modal Sosial di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember (2013), Analisis Hubungan Inflasi dan Tingkat*

Suku Bunga di Indonesia: Pendekatan Teori Fisher Effect (2013), dan Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model (2015-2016).



Dr. (cand) Yulia Indrawati, SE., M.Si, lahir di Jember, Jawa Timur (1977) adalah seorang dosen dan peneliti di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember sejak tahun 2001. Beliau menyelesaikan studi S1 bidang Ilmu

Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember (2000) dan menyelesaikan studi S2 bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2006). Saat ini beliau sedang menyelesaikan Studi S3 Bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya.

Minat penelitian adalah ekonomi moneter dan ekonomi pembangunan. Beberapa karya penelitian yang dihasilkan adalah *Ensiklopedia dan Profil UMKM di Provinsi Jawa Timur (2010)*, *Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso (2011)*, *Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember (2013)*, dan *Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model (2015-2016)*.



Inklusi Keuangan
dalam

Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Buku ini merupakan lanjutan dari buku edisi pertama yang telah terbit dengan judul “Studi Komparatif Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model”. Sub pokok bahasan pada buku kedua ini lebih menekankan pada urgensi inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dengan beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin tiada batas baik dalam dimensi ruang dan waktu. Tematik inklusi keuangan telah menjadi bahasan menarik dan telah menjadi bagian dari program utama pembangunan di hampir seluruh negara di dunia dalam upaya pendalaman sistem keuangan secara merata pada seluruh strata masyarakat. Begitu halnya di Indonesia, tantangan terbesar implementasi inklusi keuangan yang memiliki karakteristik dan kohesi sosial berbeda baik secara geografi, demografi sosiologi dan budaya. Secara khusus buku ini juga memberikan diskripsi inklusi dan literasi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan penguatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di Indonesia.